



Judul : Out dari prolegnas. RUU Sisdiknas masih butuh pendalaman
Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Out Dari Prolegnas 2022 RUU Sisdiknas Masih Butuh Pendalaman

BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat tidak memasukkan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2023. Juga tidak masuk dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas 2022.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, Pemerintah perlu mengkaji ulang draf dan naskah akademik RUU Sisdiknas yang menuai kontroversi. Pihaknya, tidak mau bila nantinya kontroversi semakin parah jika RUU Sisdiknas dimasukkan ke Prolegnas Prioritas.

"DPR tidak ingin kerusuhan yang terjadi bertambah parah. Maka kami sepakat (RUU Sisdiknas) tidak dimasukkan ke Prolegnas Prioritas," ujar Willy di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Willy meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan. Supaya tidak tercipta kerusuhan baru.

"Agar (Nadiem) benar-benar mau belajar, tidak egois, serta memperhatikan aspirasi publik. Sehingga, RUU Sisdiknas bisa mencakup kepentingan semua pihak," saran politikus Partai NasDem itu.

Anggota Komisi XI DPR ini mengungkapkan, sejatinya Pemerintah mengusulkan memasukkan RUU Sisdiknas ke Perubahan Prolegnas Prioritas

Tahun 2022 dan dibawa ke Prolegnas Prioritas 2023. Namun, di Baleg masih terdapat perdebatan.

"Mayoritas fraksi ingin RUU ini dikaji ulang agar tidak menimbulkan konflik," imbuhnya.

Anggota Baleg Bukhori Yusuf menambahkan, RUU Sisdiknas usulan Pemerintah telah menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan dari banyak stakeholder pendidikan. Mulai dari organisasi guru, pakar pendidikan, penggiat pendidikan, pemerhati pendidikan, hingga penolakan dari organisasi pelajar dan mahasiswa.

RUU Sisdiknas ini akan mengintegrasikan dan mencakup 3 undang-undang sekaligus. Yakni, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Karena bersifat sangat strategis dan vital, maka pembahasan RUU Sisdiknas harus dilaksanakan hati-hati dan komprehensif," kata Bukhori dalam keterangannya, kemarin.

Dia menekankan, RUU Sisdiknas jangan menimbulkan kesan terburu-buru, mengabaikan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan ketelitian.

"Demi menghadirkan RUU Sisdiknas yang lebih komprehensif dan terciptanya pendidikan nasional yang lebih baik di masa depan," ucapnya. ■ TIF